



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDARMAWAN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI
3. NHK : 79650

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.070.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/180 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87.5 m2/50 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 795.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 990.037.500

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 213.750.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.637.500
3. MOTOR, HONDA CBR 150 RAB 1 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI LX150F Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.250.000
5. MOBIL, HONDA CIVIC 1.5 TC CVT ES 1500 SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 486.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.340.066.168

F. HARTA LAINNYA Rp. 70.000.000

Sub Total Rp. 4.577.103.668

III. HUTANG Rp. 502.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.074.503.668



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.